

TAJUK RENCANA

Danais untuk Penanganan Covid-19

PERMINTAAN Komisi B DPRD DIY agar Pemda DIY melakukan evaluasi terhadap penggunaan dana keistimewaan (Danais) sangatlah realistis. Komisi B mengingatkan agar Danais tidak digunakan untuk urusan yang remeh temeh, melainkan disesuaikan dengan kondisi saat ini, yakni mengatasi pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi (KR, 5/1).

Diusulatkan pula agar pembangunan infrastruktur yang tidak terkait dengan penanganan pandemi sebisa mungkin ditanggihkan, dan bisa dilanjutkan setelah pandemi berakhir. Dengan kata lain, Danais bisa digunakan untuk kepentingan yang paling mendesak dan penting, yaitu urusan kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi.

Kita setuju dengan usulan Komisi B DPRD DIY yang didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat dan bersifat mendesak. Namun kita juga tak ingin penggunaan Danais dipersoalkan, bahkan menjadi temuan (baca: korupsi) lantaran tak sesuai peruntukannya. Dengan begitu, sekalipun masalah kesehatan dan ekonomi lebih diprioritaskan, namun hemat kita, harus ada payung hukum untuk mengalihkan pemanfaatan Danais tersebut. Tentu ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Seperti diketahui, berdasar peraturan perundang-undangan Danais dimanfaatkan untuk lima urusan, yakni kelembagaan, pertahanan, tata ruang, kebudayaan serta pengisian jabatan. Lima urusan inilah yang perlu didefinisikan atau paling tidak diinterpretasikan kembali sehingga tidak bersifat kaku dan sempit. Penafsiran harus didasarkan pada kebu-

tuhan mendasar masyarakat saat ini, yakni masalah kesehatan (penanganan Covid-19) dan pemulihan ekonomi.

Makna kebudayaan pun diartikan secara luas, bukan sekadar seni pertunjukan yang bersifat fisik seperti tari-tarian dan sebagainya, melainkan juga menyangkut olah nalar budi pekerti manusia.

Kita menangkap semangat legislatif di DPRD DIY untuk segera memberdayakan masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian rakyat yang selama ini terpuruk akibat dihantam pandemi Covid-19. Harapannya, permintaan tersebut segera direspons untuk kemudian dibuatkan semacam payung hukum untuk melegitimasi pengalihan penggunaan Danais ke arah yang lebih produktif dan fundamental.

Kita yakin, anggaran Danais yang mencapai Rp 1,32 triliun untuk tahun 2021 ini lebih bermanfaat bila dipergunakan untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian masyarakat di DIY. Baru setelah masalah yang fundamental ini terselesaikan bisa dilanjutkan dengan pembangunan infrastruktur atau yang terkait dengan lima urusan pembiayaan Danais sebagaimana diatur undang-undang.

Pengalihan pembiayaan Danais untuk kepentingan kesehatan dan pemulihan ekonomi menjadi makin relevan mengingat status tanggap darurat di DIY diperpanjang karena pandemi Covid-19. Kita tentu sepakat, keselamatan rakyat harus diutamakan dibanding lainnya, sebagaimana adagium yang sering kita kenal, yakni keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. □

Vaksinasi Covid-19 bagi Jurnalis

Arif Zaini Arrosyid

SELAMA masa pandemi, sekitar 300 jurnalis di Indonesia terpapar Covid-19, beberapa di antaranya meninggal. Angka tersebut kecil dibanding kenyataan. Mengingat ada jurnalis yang tidak dan belum melapor pada perusahaan pers tempatnya bekerja, karena berbagai faktor. Sehingga tidak tercatat.

Perusahaan pers dan organisasi jurnalis telah mengeluarkan protokol kesehatan peliputan masa pandemi Covid-19. Rupanya, meski telah menerapkan protokol secara ketat, paparan tidak dapat dihindarkan.

Tentu kita tidak ingin semakin banyak jurnalis yang terpapar, apalagi meninggal akibat Covid-19. Selama pandemi, mereka menjadi bagian terdepan dalam penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19. Mereka berjuang menggali informasi, dan menyampainya melalui karya jurnalistik, baik terkait perkembangan kasus, kebijakan pemerintah, lonaran ide-ide kreatif, melawan hoax.

Peran jurnalis di garis terdepan bersama pejuang penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 telah diakui dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan saat ini pers tengah berjuang dalam memahamkan perubahan perilaku, melalui pemberitaan.

Setelah memberitakan kondisi masa pandemi, kini pers dapat membantu pemerintah dalam menuntaskan vaksinasi. Sebagai garda terdepan menginformasikan program kepada masyarakat secara luas. Sebab, penjelasan pers soal vaksin yang disertai data dan penjelasan ilmiah bisa menumbuhkan kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat vaksin Covid-19. Secara khusus, Wapres meminta dukungan pers untuk turut mendukung kelancaran diseminasi informasi vaksin.

Melihat peran dan profesionalitas jurnalis, apresiasi juga dikemukakan Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Menurutnya, jurnalis bekerja tanpa

batas waktu, tanpa batas pandemic Di tengah pandemi tetap mencari sumber berita yang penuh risiko. Ada perusahaan pers yang memberikan jaminan keselamatan, namun ada juga perusahaan yang tidak memberikan jaminan keselamatan. Maka Muzani mendukung jurnalis menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pemberian vaksin Covid-19. Jaminan keselamatan pada jurnalis diperlukan. Selain, negara juga harus menjamin keamanan dari vaksin tersebut sebelum diterima masyarakat.



KR-JOKO SANTOSO

Maka, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo memberikan lampu hijau jurnalis mendapatkan vaksin periode pertama, karena jurnalis termasuk profesi yang memiliki risiko tinggi terpapar. Bahkan Satgas Penanganan Covid-19 sendiri bergantungan pada pers dalam penyampaian nilai-nilai positif pada warga untuk bersama melawan Covid-19.

Yang harus dipahami, vaksinasi bagi jurnalis tidak semata untuk kepentingan pribadinya, harus ditafsir lebih luas. Memang secara pribadi mereka membutuhkan perlindungan, agar terbentuk kekebalan tubuh. Sebab, begitu berat

dan penuh tantangan yang dihadapinya, terutama saat peliputan ke lokasi berisiko tinggi.

Vaksinasi tersebut, adalah guna mencegah gerakan anti-vaksin di tengah masyarakat. Sangat tepat disampaikan Ketua Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Prof Dr Zubairi Djoerban SpPD-KHOM yang memasukkan jurnalis sebagai role model vaksinasi.

Pemerintah mulai mendistribusikan vaksin Covid-19 ke-34 provinsi sebagai persiapan pelaksanaan Program Vaksinasi Covid-19 tahap pertama. Begitu BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat, vaksin sudah mulai disuntikkan. Besar harapan, pemerintah dapat memasukkan jurnalis dalam vaksinasi tahap pertama ini. (KR/4/1)

Perjuangan dan perlawanan pada Covid-19 masih panjang, jurnalis tetap dituntut menjadi yang terdepan. Maka itu perlu perhatian serius dari pemerintah dan semua pihak, agar mereka terutama yang berada di lapangan terhindar dari paparan Covid-19. Salah satu langkahnya adalah mendapat vaksinasi seawal mungkin. Sehingga pengalaman vaksinasi dapat disampaikan pada masyarakat melalui karya jurnalistik.

Jurnalis adalah pejuang yang kini hati, pikiran dan tiap langkahnya dicurahkan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19. Harapan kita semua Pandemi Covid-19 segera berlalu. □

**) Arif Zaini Arrosyid SIP MSc, Jurnalis SKH Kedaulatan Rakyat, Wakil Ketua PWI Temanggung*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirim artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotocopy atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Bersikap Toleran

DUNIA pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar sudah mengajarkan peserta didik untuk bersikap toleran. Hal ini antara lain diharapkan dapat membentuk pribadi yang menghargai perbedaan pendapat dan pendirian pihak lain. Mengingat keberadaan pihak manapun tidak boleh menafikan keragaman yang secara natural hadir dalam kehidupan.

Perbedaan yang ada baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama sejatinya merupakan anugerah. Bila ragam perbedaan itu dikelola dengan baik akan melahirkan kehidupan yang aman dan ten tram. Namun bila perbedaan justru dipandang sebagai suatu masalah, maka kedamaian akan sulit diwujudkan. Penting dicatat bahwa toleransi itu sendiri tidak terbatas tempat dan waktu.

Dunia pendidikan dihadapkan pada upaya untuk dapat menanamkan sikap toleran kepada para peserta didik. Keberhasilan mengemban tugas itu dapat menjadi penopang bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Di sinilah peran pendidik sebagai ujung tombak dunia pendidikan.

Pertanyaannya kemudian, langkah apa saja yang harus dilakukan pendidik agar dapat menanamkan sikap toleran pada para peserta didik terutama di tingkat sekolah dasar?

Sekolah Dasar (SD) diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam menanamkan sikap toleran kepada para peserta didik. Sekadar contoh, materi tentang bersikap toleran secara eksplisit antara lain terdapat pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas VI semester I. Membekali peserta didik kelas VI dengan materi toleransi bertujuan sebagai persiapan mereka melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mereka akan menghadapi dunia baru dengan aneka keragamannya.

Hal paling utama yang perlu dilakukan ialah pemahaman dan pembiasaan.

Artinya, peserta didik diberikan penjelasan bahwa bersikap toleran merupakan fondasi utama menjalin keakraban antarsesama. Dengan modal pemahaman tersebut, peserta didik diharapkan dapat merealisasikan dalam pembiasaan kehidupan sehari-hari sebagai langkah lanjutannya.

Contoh pembiasaan itu antara lain dalam pergaulan di sekolah tidak mengejek teman yang berbeda suku dan agamanya, menghormati pendapat teman yang berbeda ketika berdiskusi dalam kelas, dan lain sebagainya.

Melalui pemahaman dan pembiasaan bersikap toleran bila konsisten dilakukan dapat mengantarkan pada kehidupan yang rukun. Kerukunan hidup antarsesama dalam kehidupan bermasyarakat merupakan dambaan setiap orang. Oleh sebab itu, membiasakan peserta didik bergaul dengan teman-teman di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalnya dalam rangka mendukung terwujudnya kerukunan. Hal inilah yang melatari dunia pendidikan sedari dini mengajarkan sikap toleran.

Kita tentu tidak dapat membayangkan kehidupan yang rukun apabila antara satu dan yang lain tidak mau bersikap toleran. Memastikan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya kepada pihak lain akan memicu permusuhan berkepanjangan. Padahal setiap orang berhak dan bebas menentukan pilihannya masing-masing selama tidak mengganggu pihak lain.

Di sinilah arti penting sikap toleran yang memungkinkan setiap orang merdeka dengan pilihannya. Dan itulah tugas pokok pendidikan sebagaimana Prof Dr Hamka dalam bukunya *Falsafah Hidup*, menulis: "Dasar pendidikan ialah membentuk manusia merdeka di tanah air yang merdeka: bukan menjadi budak di negeri yang merdeka". □

**) Nur Isnainiyah, SPd, Guru PAI SD 1 Padokan, Kasihan, Bantul.*

Memahami Desa, Memaksimalkan Potensinya

Titik Istiyawatun Khasanah

PERGERAKAN Desa atau mengubah wajah kelam menjadi berseri sudah seharusnya dipandang dan diapresiasi sedemikian rupa oleh pemerintah supra desa dalam bentuk dukungan bagi percepatan pembangunan yang dilakukannya. Hal ini akan berlaku manakala Desa mampu menyuguhkan sekian keberhasilan. Meski keberhasilan itu lebih banyak diukur dari kinerja yang sifatnya administratif.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, riil telah membawa harapan baru bagi Desa untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Pengakuan terhadap keberadaan Desa, pemberian kewenangan kepada Desa diimbangi dengan adanya alokasi anggaran secara khusus melalui Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini menjadikan Desa mendapat ruang yang demikian luas untuk mengoptimalkan potensi demi kesejahteraan warganya.

Secara riil, pasca-lahirnya UU Desa, dengan adanya DD dan ADD, membuat masyarakat desa mampu merumuskan dan melaksanakan sendiri pembangunan seperti yang mereka 'mau'. Setidaknya, wajah fisik desa menjadi lebih baik dibandingkan dekade sebelumnya. Meski ketika ditilik lebih dalam, upaya optimalisasi potensi desa dengan memanfaatkan DD yang ada, masih belum sesuai harapan. Masih banyak desa potensial yang belum bisa mendapatkan banyak manfaat dari segenap potensi yang dimilikinya.

Angin Segar

Kungkungan regulasi selama sekian dekade yang tidak memberikan ruang bagi desa untuk merancang sendiri perubahan ditambah stigma ketidakberdayaan desa, menjadikan desa rendah diri dan tidak terbiasa bekerja keras. Alih-alih mengoptimalkan potensi, mengidentifikasi potensi dan masalah

yang dihadapinya saja, kadangkala tidak mampu. Disinilah desa membutuhkan dukungan dari luar, baik dari pemerintah supra desa maupun elemen non pemerintah.

Sekali lagi, UU Desa telah membawa angin segar bagi desa untuk berubah menjadi lebih baik. Pengakuan kepada desa didukung dengan penyelenggaraan hak desa atas anggaran melalui DD dan ADD, telah membuka ruang bagi desa untuk kembali berdaya. Hanya persoalannya, desa kembali harus dihadapkan pada ketidakberdayaan menghadapi sekian regulasi turunan UU.

Dalam hal ini, desa dituntut untuk menjadi sosok yang ideal. Sosok yang mampu membuat inovasi dalam upaya optimalisasi potensi. Sekaligus memiliki kapasitas administratif teknokratis yang memadai utamanya dalam memper-tanggungjawabkan penggunaan anggaran, sekaligus mendapatkan apresiasi untuk meraih dukungan yang lebih besar dari pemerintah supra desa. Sekian kegiatan yang sifatnya administratif teknokratik dengan sederet aplikasi keuangan dan laporan kegiatan disodorkan kepada desa yang notabene baru saja bangkit dari keterpurukan.

Tidak Mampu

Ketidakhormatan terhadap hal ini menjadikan desa tidak mampu menyusun perencanaan yang baik, serta menyampaikan capaian yang telah diraih. Berkait dengan laporan kinerja, ketidakpercayaan akan pentingnya sebuah dokumen laporan, ditambah dengan deadline wak-

tu yang mendesak pun menjadikan Desa asal-asalan menyusun laporan kinerja. Tanpa tahu bahwa dokumen ini akan menentukan besaran apresiasi baginya.

Melihat situasi ini, riil peningkatan kapasitas aparat desa menjadi kebutuhan. Penguatan perspektif, komitmen, pemahaman, dan kemampuan memetakan potensi serta menggolongkan jaringan menjadi bagian besar yang harus ada dalam upaya ini. Mekanisme lain mengukur keberhasilan desa juga penting dipikirkan selain mengandalkan pelaporan. Semisal dengan menghadirkan evaluator program professional ke desa. Selain itu, dukungan regulasi yang tidak membelenggu desa, komitmen pemerintah supra desa untuk mendukung perubahan di desa, sangat dibutuhkan.

Termasuk di dalamnya menegakkan tatanan kehidupan politik yang lebih beretika. Yang menjunjung tinggi keadilan dan mengutamakan kepentingan rakyat tanpa pandang bulu. □

**) Titik Istiyawatun Khasanah, S.I.P., Lurah Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul Periode 2018-2024*

Pojok KR

Pengembangan jalan tol, finalisasi RDTR Sleman Timur.

-- **Aspirasi masyarakat tetap diakomodasi.**

Kenaikan harga telur ayam picu inflasi Yogya. --**Mudah-mudahan tak ada spekulasi mainkan harga.**

Jangan ada penerima bansos dobel. -- **Pengurus RT/RW pasti paling tahu.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjianti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurija Nugroho Samawi SE MM MSc. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfi MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Aftahi, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono., **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrky2@yahoo.com, iklankrky13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarua...Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi Di s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm), Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%